

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Pendidikan

2.1.1 Konsep Kebijakan Pendidikan

Kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani yaitu “*polis*” yang artinya kota. Analisis kebijakan pendidikan dapat dipahami baik melalui pendekatan metodologis maupun konseptual. Metodologi pada intinya merupakan keseluruhan proses yang secara sistematis dilakukan untuk melembagakan analisis kebijakan dalam suatu sistem dan mekanisme yang institusional. Secara konseptual analisis kebijakan merupakan suatu ilmu perancangan sosial (*social engineering*) yang artinya ialah ilmu yang ditujukan untuk melahirkan manfaat dari konsep dan teori dalam berbagai disiplin ilmu sosial untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh suatu kebijakan publik (Suryadi dan Budimansyah, 2009, h. 49).

Good dalam Imron (2008, h. 18) menyatakan bahwa,

“Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assesment of situational factors, operating within institutionalized adecation as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives”.

Pengertian pernyataan di atas adalah, bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil

keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Tilaar dan Nugroho (2008, h. 140) menyatakan bahwa ada beberapa aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan, di antaranya adalah:

- 1) Kebijakan pendidikan dilahirkan dari kesatuan teori dan praktik
- 2) Kebijakan pendidikan mempunyai validitas perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu
- 3) Kebijakan pendidikan ditujukan pada kebutuhan peserta didik
- 4) Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran visi, misi dan tujuan pendidikan
- 5) Kebijakan pendidikan memiliki kejelasan tujuan untuk melahirkan pendidikan yang tepat.

Selain itu, kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

- 1) Memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
- 2) Memenuhi aspek legal-formal; Kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi

yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut.

- 3) Memiliki konsep operasional agar dapat diimplementasikan dan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai.
- 4) Dibuat oleh yang berwenang; Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga dan sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan.
- 5) Dapat dievaluasi; Kebijakan pendidikan tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki.
- 6) Memiliki sistematika; Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya (Suparlan, h. 2).

Dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan relevan adalah bagaimana memahami berbagai isu kebijakan pendidikan agar mampu melahirkan berbagai gagasan yang berguna dalam upaya menghasilkan alternatif kebijakan dalam membangun sistem pendidikan yang efisien, bermutu, dan sesuai dengan tuntutan

masyarakat. Kebijakan pendidikan adalah suatu bentuk tindakan yang diambil atas beberapa pertimbangan, untuk mengarahkan manajer/kepala sekolah dalam menentukan masa depan sekolah sesuai dengan visi, misi pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

2.1.2 Konsep Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamatkan dengan tegas perlunya penanganan pendidikan anak usia dini, hal tersebut bisa dilihat pada pasal 1 butir 14 yang menyatakan bahwa:

“Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.

Kemudian dalam Pasal 28 ayat 1-3 menyatakan bahwa,

“Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat”.

Sehubungan dengan kenyataan yang telah disebutkan sebelumnya, maka anak-anak yang tersentuh pendidikan dini yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal sudah sangat banyak jumlahnya. berkenaan dengan hal tersebut, maka sewajarnya bila peran

pendidikan luar sekolah yang mencakup pendidikan formal memberikan pelayanan pendidikan dini pada anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan di jalur pendidikan formal sangatlah penting dan mendesak.

Untuk membangun dan mengembangkan PAUD, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari sistem perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang bersifat teknis operasional. Berbagai ketentuan tentang pendidikan anak usia dini termuat dalam UU RI No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai dengan jenjang pendidikan tinggi. Pada pasal 28, ditetapkan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan informal (Musbikin, 2010, h. 48-49).

Pendidikan anak usia dini dalam pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA). Pendidikan anak usia dini dalam jalur nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan, pendidikan anak usia dini dalam jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan (Musbikin, 2010, h. 49).

Selibhnya, ketiga jalur pendidikan itu dapat kita jelaskan sebagai berikut; *Pertama*, satuan pendidikan anak usia dini pada jalur

formal. Pada jalur ini, ada beberapa institusi pendidikan yang jamak dikenal. Berikut di antaranya:

- 1) Taman Kanak-Kanak, yakni salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 sampai 6 tahun.
- 2) Raudhatul Athfal, yaitu salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam bagi anak usia 4 sampai 6 tahun.
- 3) Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal yang sederajat. Salah satu bentuk pendidikan anak usai dini pada jalur pendidikan formal selain taman kanak-kanak dan raudhatul athfal yaitu tarbiyatul athfal (TA), taman kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Adi Sekha, TK-SD Satu Atap, TK Asuh, TK Anak Pantai, TK Bina Anaprasa, TK di lingkungan tempat kerja, TK keliling, TK mahasiswa KKN, atau TK di lingkungan tempat ibadah (Musbikin, 2010, h. 49).

Kedua, satuan pendidikan anak usia dini pada jalur non formal.

Hal ini meliputi beberapa hal seperti berikut:

- 1) Kelompok bermain, yaitu salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 sampai 4 tahun.
- 2) Taman penitipan anak. Salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program

kesejahteraan sosial, perawatan, pengasuhan, dan pendidikan sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun.

3) Satuan pendidikan anak usia dini sederajat. Salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal selain taman penitipan anak dan kelompok bermain di antaranya, yaitu:

1) Pos pendidikan anak usia dini (Pos PAUD), yakni salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan program bina keluarga balita (BKB) dan/atau pos pelayanan terpadu (Posyandu).

2) Taman asuh anak muslim (TAAM), yakni salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak berusia 2 tahun sampai dengan 6 tahun yang berbasis Taman Pendidikan Al-Qur'an.

3) Pendidikan anak usia dini sekolah minggu (PAUD-SM), yakni salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan Kristen bagi anak berusia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun yang berbasis sekolah minggu (Musbikin, 2010, h. 50).

4) Pendidikan anak usia dini bina iman anak (PAUD-BIA), adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan Katolik bagi anak berusia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun yang berbasis bina iman anak Katolik.

Program pembelajaran pada anak usia dini di TK/RA dan bentuk lain yang sederajat menggunakan beban belajar satu tahun dalam bentuk perencanaan semester, perencanaan mingguan, dan perencanaan harian. Perencanaan program pembelajaran di TK/RA dan bentuk lain yang sederajat adalah perencanaan mingguan efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) ada 34 minggu, dengan jam belajar efektif 2,5 jam (150 menit); per minggu adalah 15 jam (900 menit); dan pertahun adalah 510 jam (30.600 menit) (Musbikin, 2010, h. 51).

Sementara itu, perencanaan pembelajaran pada kelompok bermain adalah untuk usia 2-4 tahun, kegiatan bermain per minggu minimal tiga kali pertemuan ideal selama 4 jam. Sedangkan, untuk perencanaan program pembelajaran pada taman penitipan anak adalah sebagai berikut:

- 1) *Full day care*; Anak dititipkan sehari penuh, dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00.
- 2) *Semi day care*; Anak dititipkan hanya setengah hari, dari jam 08.00 sampai dengan jam 12.00. atau jam 12.00 sampai jam 17.00.
- 3) *Incidental day care*; Anak hanya dititipkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan orang tua (Musbikin, 2010, h. 52).

Adapun untuk perencanaan program pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini sejenis adalah layanan minimal yang hanya dilakukan 1-2 kali/minggu. Tiap pertemuan minimal selama 2 jam dengan pertemuan ideal selama 6 jam. Sementara itu, berkaitan tentang kalender pendidikan, maka kalender pendidikan anak usia dini mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender pendidikan tersebut disesuaikan dengan kondisi daerah setempat

Selanjutnya, sebagai implementasi dari undang-undang di atas (UU RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional), pemerintah juga telah mengeluarkan PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU No.14/2006 tentang Guru dan Dosen, di mana salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini wajib memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S-1 serta kompetensi sebagai pendidik. Para calon guru yang telah memiliki kualifikasi akademik S1 dan kompetensi sebagai pendidik selanjutnya harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Selain perundang-undangan, telah ditetapkan pula kebijakan pemerintah berkenaan dengan tugas dan ekspektasi kinerja guru PAUD (Musbikin, 2010, h. 53).

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini terbagi dari pendidikan formal, non formal,

dan informal. Dan guru pendidikan anak usia dini hendaknya memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S-1.

PAUD memegang peranan yang sangat penting dan menentukan bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya karena merupakan pondasi bagi dasar kepribadian anak. Anak yang mendapatkan pembinaan yang tepat dan efektif sejak usia dini akan dapat meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan fisik dan mental, yang berdampak pada peningkatan prestasi belajar anak, etos kerja anak, produktivitas sehingga mampu mandiri dan mengoptimalkan potensi dirinya. PAUD sangat menentukan kesuksesan seseorang di masa depan; bagaimana seseorang merespons berbagai permasalahan yang dihadapi dalam setiap langkah kehidupan sangat ditentukan oleh pengalaman dan pendidikan yang diperoleh pada saat usia dini (Al-Khluqo, 2015, h. 40-41).

2.1.3 Kebijakan Kepala Sekolah

Untuk meningkatkan suatu sekolah yang bermutu di perlukan suatu kebijakan yang tepat dengan membuat suatu program program sesuai dengan tujuan sekolah yaitu visi dan misi. Kebijakan kepala sekolah terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan kepala sekolah. Sebelum kita mengetahui makna dari kebijakan kepala sekolah terlebih dahulu kita harus mengetahui makna dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan adalah terjemahan dari kata "*wisdom*" yaitu suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang atau kelompok orang tersebut tudak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain ia dapat

pengecualian artinya *wisdom* atau kebijakan adalah suatu kearifan pihak yang menentukan kebijakan, dapat saja mengecualikan aturan yang baku kepada seseorang atau sekelompok orang, jika mereka tidak dapat dan tidak meungkin tadi, dengan kata lain dapat di kecualikan tetapi tidak melanggar aturan (Syafaruddin & Asrul, 2015, h. 14).

Hal ini kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Menurut Gamage dan Pang yang dikutip oleh Sagala (2009, h. 75), dalam kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang laus untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program. Sedangkan Nichols dalam Syafaruddin (2008, h. 76) kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan yang berulang ulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan aturan keputusan.

Adapun menurut penulis, kebijakan adalah hasil keputusan yang dibuat oleh kepala sekolah atau madrasah dalam mengambil suatu keputusan baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan masa depan sekolah yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat. Selain itu pengambilan keputusan atau kebijakan tidak bisa

dipisahkan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu bagian terpenting dalam manajemen.

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tanggung jawab kepala sekolah atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Kepala sekolah adalah pemimpin yang proses kehadirannya dapat dipilih secara langsung, ditetapkan oleh yayasan atau ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Damayanti yang dikutip Ali Imron (2008, h. 18), kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu “kepala” dan ”sekolah”. Kata “kepala“ dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga, sedangkan “sekolah” diartikan sebagai sebuah lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi, secara umum, kepala sekolah dapat diartikan seagai pemimpin sekolah atau satu lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran.

Maka kebijakan kepala sekolah adalah suatu ketentuan kepala sekolah yang berupa rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan serta cara bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang ingin dicapai di sekolah dalam mengambil suatu keputusan dalam rangkah meningkatkan mutu pendidikan (Imron, 2008, h. 16).

Agar kepala sekolah mampu bergerak dari pemimpin level bawah sampai level yang lebih tinggi dibutuhkan empat (4) unsur yaitu;

- 1) Kepala sekolah harus memiliki visi yang baik dan terbuka agar mampu menerima berbagai hal yang baru, walaupun mungkin bertentangan dengan apa yang diyakininya.
- 2) Unsur keberanian, kepala sekolah yang mencintai pekerjaannya akan memiliki keberanian yang tinggi dan berani mengambil resiko.
- 3) Kemampuan untuk bekerja dalam alam yang realistis, harus dapat membedakan mana opini dan mana yang fakta.
- 4) Harus memiliki kemampuan menjadi pemimpin, tidak sekedar pemimpin legalitas, adalah memiliki kepedulian dan sensitivitas yang tinggi tetapi mengedepankan nilai-nilai luhur, cinta, kasih sayang dan integritas, komitmen dalam memimpin agar memperoleh kepercayaan (Imron, 2008, h. 18).

Oleh karena itu, mutu kepala sekolah sebaiknya diarahkan kepada pembentukan kepala sekolah yang efektif, namun peningkatannya sebaiknya diawali pengembangan standar kompetensi kepala sekolah yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menjamin mutu pelayanan pendidikan dan mutu manajemen pendidikan, maka pengembangan standar kompetensi kepala sekolah meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Menjamin keberhasilan sekolah dalam

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan (Muhaimin dkk, 2009, h. 32-33).

Di samping itu, hal penting yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah adalah membangun visi yang telah dimiliki oleh sekolah dengan mensosialisasikan, mengkomunikasikan, menghidupkan, bahkan mengembangkan visi tersebut agar mempunyai arti, bermakna bagi kehidupan sekolah dengan mengembangkan standar kompetensi kepala sekolah meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. menjamin keberhasilan sekolah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Jika melihat dalam konsep kepemimpinan dalam Islam bahwa kepemimpinan merupakan suatu hal yang harus ada dalam aktivitas kehidupan umat manusia. Tanpa adanya kepemimpinan, maka tatanan dunia akan kacau dan penuh dengan masalah. Olehnya itu, sejak Islam diturunkan untuk manusia, selalu mementingkan urusan kepemimpinan.

Nabi Muhammad, para sahabatnya, hingga kepemimpinan setelahnya, terus berusaha memberi kepemimpinan yang terbaik. Karena pentingnya kepemimpinan ini, Allah SWT. menyebutkan secara khusus ayat yang terkait dengan kepemimpinan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ

فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا

تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Ketika Allah swt memberitahukan kepada para malaikat-Nya) bahwa Dia akan menjadikan Adam a.s. sebagai khalifah) di bumi, maka para malaikat itu bertanya, mengapa Adam yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi, padahal Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Para malaikat menganggap bahwa diri mereka lebih patut memangku jabatan itu, sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji dan menyucikan Allah swt. Allah swt tidak membenarkan anggapan mereka itu, dan Dia menjawab bahwa Dia mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat. Segala yang akan dilakukan Allah swt adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmah-Nya yang Mahatinggi walaupun tak dapat diketahui oleh mereka, termasuk pengangkatan Adam a.s. menjadi khalifah di bumi.

Yang dimaksud dengan kekhalifahan Adam a.s. di bumi adalah kedudukannya sebagai khalifah di bumi ini, untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya, dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan

segala apa yang ada padanya. Pengertian ini dapat dikuatkan dengan firman Allah: "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi" (Shad/38: 26). Sebagaimana diketahui Daud a.s. di samping menjadi nabi juga menjadi raja bagi kaumnya. Ayat ini merupakan dalil tentang wajibnya kaum Muslimin memilih dan mengangkat seorang pimpinan tertinggi sebagai tokoh pemersatu antara seluruh kaum Muslimin yang dapat memimpin umat untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di bumi ini.

Para ulama telah menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh tokoh pimpinan yang dimaksudkan itu, antara lain ialah: adil serta berpengetahuan yang memungkinkannya untuk bertindak sebagai hakim dan mujtahid, tidak mempunyai cacat jasmaniah, serta berpengalaman cukup, dan tidak pilih kasih dalam menjalankan hukum-hukum Allah.

2.1.4 Tujuan Kebijakan Pendidikan

Suyadi dan Ulfah (2013, h. 17) mengatakan,

Pendidikan anak usia dini (PAUD) pada hakikatnya ialah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak.

Wiyani dan Barnawi (2012, h. 78) berpendapat tentang tujuan pendidikan anak usia dini sebagai berikut,

Secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai

persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Secara khusus, tujuan pendidikan anak usia dini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) agar anak percaya akan adanya Tuhan dan mampu beribadah serta mencintai sesamanya.
- 2) agar anak mampu mengelolah keterampilan tubuhnya, termasuk gerakan motorik kasar dan motorik halus, serta mampu menerima rangsangan sensorik.
- 3) anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif sehingga dapat bermanfaat untuk berpikir dan belajar.
- 4) anak mamapu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab-akibat.
- 5) anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat, menghargai keragaman sosial dan budaya, serta mampu mengembangkan konsep diri yang positif dan kontrol diri.
- 6) anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, berbagai bunyi serta menghargai karya kreatif.

Puskur dalam Suyadi dan Ulfah (2013, h. 19) menjelaskan tentang tujuan pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut,

Secara umum tujuan Pendidikan Anak Usai Dini ialah memberikan stimulasi atau rangsangan begi perkembangan potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam hal ini posisi Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa , berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap.

Selain dari pemaparan di atas, tujuan PAUD menurut UNESCO ECCE (*Early Childhood Care and Education*) dalam Suyadi dan Ulfah (2013, h. 20) adalah sebagai berikut:

.....tujuan PAUD antara lain sebagai berikut. 1. PAUD bertujuan untuk membangun fondasi awal dalam meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah. 2. PAUD bertujuan menanam investasi SDM yang menguntungkan, baik bagi keluarga, bangsa, negara, maupun agama. 3. PAUD bertujuan untuk menghentikan roda kemiskinan. 4. PAUD bertujuan turut serta aktif menjaga dan melindungi hak asasi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang.

Jadi, selain mempersiapkan anak untuk memasuki pendidikan ke jenjang dasar, tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak dan mengembangkan potensi serta bakat yang ada pada diri anak usia dini.

Tujuan dilakukannya kebijakan dilihat dari ruang lingkup waktunya terdapat tiga jenis perencanaan nasional pendidikan yang perlu dibuat secara teratur dan sinambung. Ketiga jenis kebijakan tersebut meliputi kebijakan jangka panjang, menengah dan pendek.

1) Kebijakan Jangka Panjang (periode 25 tahun)

Kebijakan jangka panjang pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bersifat prospektif (antisipasi masa depan), yaitu kebijakan negara dibidang pendidikan yang ditentukan oleh suatu

proyeksi pendidikan dalam suatu cakupan waktu ke depan. Perencanaan ini dimaksudkan untuk menghasilkan skenario masa depan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia yang perlu diciptakan pada akhir kurun waktu pembangunan jangka panjang kedua (Suryadi dan Tilaar, 1994, h. 75).

2) Kebijakan Jangka Menengah

Rencana pembangunan (repelita) lima tahun sektor pendidikan disusun dengan jabaran yang telah operasional, menjadi kebijakan, program-program dan sasaran pembangunan masing-masing program pembangunan. Secara umum, gambaran repelita dapat digunakan sebagai berikut:

- (1) Arah dan kebijakan repelita.
- (2) Keadaan dan masalah, masalah-masalah pokok yang disimpulkan dari keadaan pendidikan sebagai hasil dari penilaian dan kajian pelaksanaan pendidikan dalam repelita sebelumnya.
- (3) Kebijaksanaan dan langkah-langkah, Kebijakan ini dikembangkan berdasarkan analisis terhadap keadaan masalah pendidikan sekarang dan perkiraan dalam lima tahun mendatang.
- (4) Program dan sasaran, jika kebijakan yang dirumuskan di atas telah dilaksanakan (Suryadi dan Tilaar, 1994, h. 77).

3) Kebijakan Jangka Pendek

Dalam perencanaan tahunan, masing-masing meliputi empat periode dengan lama tiga bulan untuk tiap periode yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, tahap persiapan perencanaan, tahap ini merupakan persiapan data khususnya yang berkaitan dengan jumlah peserta didik yang akan dilayani, kepegawaian, sarana dan prasarana yang diperlukan serta peralatan yang dibutuhkan.

Kedua, periode ini merupakan waktu untuk merumuskan dan mempublikasikan kebijakan.

Ketiga, urusan proyek dan penetapan pagu anggaran. Periode untuk melaksanakan usulan anggaran proyek.

Keempat, dalam periode ini persiapan pelaksanaan proyek pembangunan telah dilaksanakan dan persiapan untuk siklus perencanaan tahun berikutnya mulai dirintis dan dilaksanakan. Proses perencanaan dan pengambilan kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan siklus yang paling menentukan jika analisis kebijakan ingin memberikan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pendidikan (Suryadi dan Tilaar, 1994, h. 82).

Fungsi kebijakan pendidikan adalah untuk mengarahkan kegiatan yang akan dilaksanakan kedepan agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien serta sebagai pedoman bertindak dalam suatu organisasi agar kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan. Sedangkan tujuan dibuatnya kebijakan adalah untuk melakukan dan

mengarahkan pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.1.5 Komponen Kebijakan

2.1.5.1 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang kebijakan-kebijakan yang baru. Perumusan masalah adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil atas beberapa pertimbangan baik dari pertimbangan tujuan, strategi, maupun kepentingan lingkungan eksternal (Dunn, 1999, h. 226).

Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses dengan empat fase yang saling tergantung, yaitu:

- 1) Pencarian masalah (*problem search*) proses penemuan dan penyatuan beberapa representasi masalah yang dihasilkan oleh para pelaku kebijakan.
- 2) Pendefinisian masalah (*problem definition*) proses mengkarakteristikkan masalah-masalah substantif kedalam istilah-istilah yang paling dasar dan umum.
- 3) Spesifikasi masalah (*problem specification*) tahap pemahaman masalah dimana analisis mengembangkan representasi masalah substantif secara formal (logis).

- 4) Pengenalan masalah (*problem sensing*) tahap perumusan masalah dimana analisis mengalami kekhawatiran yang campur aduk dan gejala ketegangan dengan cara mengenali situasi masalah (Dunn, 1999, h. 227).

2.1.5.2 Peramalan

Peramalan (*forecasting*) adalah suatu prosedur untuk membuat informasi yang faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tentang masalah kebijakan ramalan mempunyai tiga bentuk utama, yaitu:

- 1) Proyeksi adalah ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi atas kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan,
- 2) Sebuah prediksi adalah ramalan yang didasarkan pada asumsi teoritik yang tegas. Sifat terpenting dari prediksi adalah menspesifikasikan kekuatan penyebab dan akibat yang diyakini mendasari suatu hubungan
- 3) Suatu perkiraan adalah ramalan yang didasarkan pada penilaian yang informatif atau penilaian pakar tentang situasi masyarakat di masa depan (Dunn, 1999, h. 291-292).

2.1.5.3 Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai sasarannya. Dalam rekomendasi kebijakan maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana prakondisi untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

- 1) Komunikasi, pemimpin harus mengkomunikasikan kepada bidang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan supaya mereka memahami kebijakan yang menjadi tanggungjawabnya.
- 2) Sumber daya manusia harus mendukung pelaksanaan kebijakan, jika SDM tidak mendukung maka menghambat pelaksanaan kebijakan.
- 3) Disposisi atau pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan harus ditetapkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, serta komitmen melaksanakan kebijakan yang dimaksud
- 4) Struktur birokrasi, koordinasi menjadi faktor yang penting dalam pelaksanaan kebijakan (Syafaruddin, 2008, h. 91-92).

2.1.5.4 Pemantauan

Pemantauan atau monitoring menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat kebijakan yang diambil sebelumnya. Pemantauan (*monitoring*) merupakan

prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Pemantauan memiliki empat fungsi dalam analisis kebijakan yaitu:

- 1) Kepatuhan (*compliance*) pemantauan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan para administrator program, staf, dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat.
- 2) Pemeriksaan (*auditing*) pemantauan membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu telah sampai pada mereka.
- 3) Akuntansi (*monitoring*) menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
- 4) Eksplanasi pemantauan juga menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan public dan program berbeda (Dunn, 1999, h. 20).

2.1.5.5 Evaluasi

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah dapat terselesaikan tetapi juga menyumbang pada

klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan masalah kembali. Evaluasi kebijakan merupakan tahap penting dalam kebijakan publik (Syafaruddin, 2008, h. 96).

Ada beberapa fungsi evaluasi di antaranya yaitu:

- 1) Evaluasi memberi informasi yang falit dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.
- 2) Evaluasi kebijakan memberi sumbangan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
- 3) Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi (Syafaruddin, 2008, h. 97).

Dalam proses pembuatan kebijakan/analisis kebijakan maka harus memperhatikan lima komponen yaitu: perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan serta evaluasi. Kelima komponen tersebut saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lainnya, karena kelima komponen tersebut dapat berguna untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relefan dengan kebijakan dalam berbagai konteks pendidikan.

2.2 Konsep Peningkatan Mutu

2.2.1 Pengertian Mutu

Mutu atau kualitas memiliki definisi yang bervariasi dari yang konvensional sampai yang lebih strategi. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti: performansi (*performance*), keandalan (*reliability*), mudah dalam menggunakan (*easy of use*), estetika (*esthetic*) dan sebagainya. Definisi strategi dari mutu adalah suatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*) (Gasperz, 2005, h. 4). Selanjutnya, Gasperz melanjutkan, dalam ISO 8402 (*Quality Vocabulary*), kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikkan atau ditetapkan. Kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) atau konformansi terhadap kebutuhan atau persyaratan (*conformance to the requirement*). Di sini produk dapat berbentuk (*tangible*), tak berbentuk (*intangibile*) atau kombinasi keduanya.

Sedangkan Dessler (2003, h. 261) mengartikan kualitas sebagai totalitas tampilan dan karakteristik sebuah produk atau pelayanan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dicari. Dengan kata lain, kualitas mengukur bagaimana baiknya sebuah produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelangganya. Menurut Arcano, mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki

kualitas yang dihasilkan. Di sini fokus mutu didasari upaya positif yang dilakukan individu atau bagian dari rangkaian kerja yang mana merupakan proses unik yang memberikan sumbangan pada penciptaan keluaran. Upaya mendefinisikan kualitas telah dilakukan oleh para "guru" atau pakar manajemen kualitas.

Tunggal (2002, h. 58) mengutip pendapat Juran bahwa kualitas sebagai kecocokan untuk pemakaian (*fitness for use*), definisi ini menekankan orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan. Pengertian cocok untuk pelanggan ini mengandung 5 dimensi utama, yaitu kualitas desain, kualitas kesesuaian, ketersediaan, keamanan dan *field use*. Juran sangat terkenal dengan konsep trilogi kualitas, yaitu: perencanaan kualitas (*quality planning*), pengendalian kualitas (*quality control*), dan perbaikan atau peningkatan kualitas (*quality improvement*).

Juran dalam Sallis (2010, h. 108) mengatakan bahwa upaya pencapaian mutu merupakan upaya menciptakan kesesuaian dengan tujuan dan manfaat. Ide ini menunjukkan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan mungkin sudah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, tetapi belum tentu sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan.

Kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), konformansi terhadap kebutuhan atau persyaratan (*conformance to the requirements*) dan upaya perubahan ke arah perbaikan terus menerus (*continuous improvement*). Menurut Sallis, definisi relatif tentang kualitas memiliki dua aspek yaitu pertama

adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi dan kedua adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Aspek yang pertama merupakan definisi produsen tentang mutu, sedangkan aspek yang kedua adalah definisi mutu dari pelanggan.

Susilo (2003, h. 8) menjelaskan definisi mutu menurut Crosby sebagai kesesuaian terhadap persyaratan (*Quality has to be defined as conformance to requirements*). Dalam ISO 9001, mutu didefinisikan sebagai *The totality of features and characteristic of a product, or a service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs*. Pandangan Deming sebagaimana dikutip oleh Nasution (2015, h. 2-3) menyatakan, bahwa kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Apabila juran mendefinisikan kualitas sebagai *fitness for use* dan Crosby sebagai *conformance to requirement* maka Deming mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Feigenbaum menyatakan, bahwa kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Suatu produk berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk. Gaevin dan Davis menyatakan, bahwa kualitas adalah suatu kondisi yang berkelanjutan yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen.

Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara universal, namun dari kelima definisi di atas terdapat beberapa kesamaan, yaitu dalam elemen-elemen sebagai berikut:

1. Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan
2. Kualitas mencakup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan.
3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang) (Nasution, 2015, h. 3).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mutu merupakan derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Maksud derajat atau tingkat berarti selalu ada peningkatan setiap saat.

2.2.2 Mutu Lembaga Pendidikan

Pendidikan bermutu adalah dambaan setiap orang ataupun lembaga. Masyarakat dan orang tua mengharapkan agar anaknya mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan dapat bersaing dalam memperoleh berbagai peluang yang ada. Pemerintah mengharapkan setiap lembaga pendidikan berkualitas, karena dengan pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang akan memberi pengaruh terhadap pembangunan negara ini. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas baik industri bisnis maupun lembaga lainnya akan secara tidak langsung akan

mempengaruhi kinerja industri bisnis maupun lembaga (Ali, 2009, h. 331).

Mutu atau kualitas pendidikan merupakan standar yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan untuk memenuhi persyaratan dan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan pelanggan atau masyarakat untuk memuaskannya. Mutu selalau diikuti sifat-sifat istimewa seperti baik, benar, dan indah. Untuk mengetahui apakah suatu produk itu bermutu atau tidak, ada dimensi yang perlu diperhatikan untuk memudahkan dalam melihat dimensi mutu suatu industri produk maupun jasa. Mutu di bidang pendidikan meliputi 4 mutu *input*, proses, *output*, dan *outcome*, yaitu :

- 1) *Input* pendidikan dinyatakan bermutu apabila telah berproses (KBM) di lembaga pendidikan.
- 2) Proses pendidikan bermutu jika mampu menciptakan suasana yang aktif, kreatif dan juga menyenangkan di lingkungan lembaga pendidikan.
- 3) *Output* dinyatakan bermutu jika hasil belajar dalam bidang akademik dan nonakademik siswa tinggi.
- 4) *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan lembaga pendidikan cepat terserap di jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang favorit, di dunia kerja, gaji yang wajar, dan semua pihak mengakui kehebatannya, lulusannya dan merasa puas.

2.2.3 Dimensi Mutu

Garvin yang dikutip oleh Nasution (2015, h. 3-4) mengidentifikasi delapan dimensi kualitas yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas, yaitu sebagai berikut:

1. Performa (*performance*), berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk. Misal, performansi dari produk mobil adalah kecepatan, kenyamanan dan pemeliharaan.
2. Keistimewaan (*features*), merupakan aspek kedua yang menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. Misal, *features* untuk produk mobil adalah atap yang bisa dibuka. *Features* merupakan ciri-ciri atau keistimewaan tambahan atau pelengkap.
3. Keandalan (*reliability*), berkaitan dengan kemungkinan suatu produk berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Misal, keandalan mobil adalah kecepatan.
4. Konformansi (*conformance*), berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan.
5. Daya tahan (*durability*), merupakan ukuran masa pakai suatu produk. Karakteristik ini berkaitan dengan daya tahan dari produk itu.
6. Kemampuan pelayanan (*service ability*), merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan/kesopanan, kompetensi, kemudahan serta akurasi dalam perbaikan.
7. Estetika (*aesthetics*), merupakan karakteristik mengenai keindahan yang bersifat subyektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pikiran individual.
8. Kualitas yang dipersepsikan (*perceived quality*), bersifat subjektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk, seperti meningkatkan harga diri.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi mutu atau kualitas terdiri dari performa, keistimewaan, keandalan, konformansi, daya tahan, kemampuan pelayanan, estetika, dan kualitas yang dipersepsikan. Adapun dalam penelitian ini, yang menjadi ukuran kualitas adalah kepuasan pelanggan pendidikan di RA

Asy-Syafi'iyah Kota Kendari. Pelanggan yang dimaksudkan adalah orang tua/wali siswa.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Mutu

Prinsip-prinsip dalam mutu adalah bagaimana melakukan apa yang penting dan bagaimana melakukan apa yang harus dilakukan. Prinsip mutu terdiri dari: fokus pelanggan, perbaikan yang terusmenerus, pemberdayaan karyawan, patok duga, *just in time* dan *tool* untuk manajemen mutu terpadu (Ma'arif & Tanjung, 2011, h. 129). Berikut ini adalah penjelasan prinsip-prinsip mutu atau kualitas:

1. Fokus pelanggan, menjadi kebutuhan setiap organisasi. Persolan yang sering muncul adalah organisasi tidak tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan.
2. Perbaikan yang terus menerus, menjadi falsafah Jepang yang terkenal dengan istilah *Kayzen*. Orang barat menyebutnya "*continuous improvement*" artinya tidak ada rumus final dari produk atau jasa. Nama lainnya yaitu: *zero defect*.
3. Pemberdayaan karyawan, Pemeberdayaan karyawan dalam hal KASAt (*knowledge, ability, skill and attitude*), menjadi prinsip mutu yang harus dilakukan. Karena jika ingin bermutu satu produk atau jasa harus dimulai dari karyawannya.
4. Patok duga, Patok duga menjadi prinsip mutu yang pas untuk masa depan. Organisasi dapat patok duga dalam mutu *input*, mutu proses atau mutu *output*. Patok duga harus sesuai dengan perusahaan.

Patok duga juga disebut upaya memilih praktik terbaik yang digunakan sebagai standar untuk sebuah *performance*.

5. *Just in time*, Inti dari *Just in time* (JIT) adalah pemborosan harus dihilangkan, serta mengarahkan perusahaan untuk terus memperbaiki proses dan operasi agar produksi dapat ditekan serendah mungkin tanpa mengurangi mutu yang ada.

6. *Tool* untuk manajemen mutu terpadu, Piranti dalam manajemen mutu terpadu terdiri dari: *quality function deployment* dalam hal ini *house of quality*, *taguchi technique*, *quality loss function*, *paretocharts*, *process charts*, *cause-and-effect diagrams* dan *statistical process control* (Ma'arif & Tanjung, 2011, h. 130).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip mutu dalam pendidikan adalah memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Sedangkan pelanggan dibagi menjadi dua yaitu: 1) Pelanggan internal (di dalam lembaga pendidikan, guru, selalu mendapat pelayanan yang memuaskan dari petugas TU, Kepala Sekolah selalu puas terhadap hasil kerja guru dan guru selalu menanggapi keinginan siswa), 2) Pelanggan eksternal (di luar organisasi misalnya masyarakat umum, wali murid, perusahaan, serta perguruan tinggi atau sekolah lanjutan).

2.3 Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu RA (PAUD)

2.3.1 Konsep Peningkatan Mutu RA (PAUD)

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen pendidikan (Shaleh, 2004, h. 243).

Mutu pendidikan merupakan dasar suatu kesuksesan sekolah dalam menghasilkan murid yang berkualitas. Orang tua sangat tertarik dengan sekolah yang mampu memberikan mutu kepada anak mereka. Hal ini yang mendorong dari pihak sekolah untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Sekolah akan lebih berkualitas atau bermutu apabila mempunyai guru atau tenaga pendidik yang terlatih. Guru yang terlatih dapat memahami dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi mengenai persoalan murid yang biasa di bawah umur 6 tahun. Menurut Muhson, peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, pelatihan dan pendidikan, ataupun dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran dan nonpembelajaran secara professional lewat penelitian tindakan secara terkendali (Muhson, 2008, h. 1).

Peningkatan mutu pendidikan pada anak usia dini tergantung dari faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam mencapainya. Faktor pendukung yaitu antara meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini, sehingga mereka tidak keberatan menitipkan anaknya pada TPA maupun KB walaupun dengan biaya yang cukup mahal, hal ini didukung juga gencarnya pemerintah dengan mensosialisasikan melalui dinas pendidikan atau kementerian Agama dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik untuk pengelola maupun tenaga pendidik pada lembaga PAUD, sehingga diharapkan lembaga PAUD dapat memberikan layanan yang optimal (Hiryanto dkk., 2010, h. 12).

Faktor penghambat, meliputi keterbatasan dana yang dimiliki, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendah dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, rendahnya keperdulian terhadap pendidikan anak usia dini, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini khususnya pada masyarakat pedesaan sehingga untuk mengatasi keterbatasan dana dilakukan dengan cara meminta bantuan dana dari masyarakat, melakukan pembinaan terhadap tenaga kependidikan melalui program pengayaan, mengikutsertakan pengelola maupun pendidik dalam berbagai pelatihan maupun workshop pendidikan anak usia dini (Hiryanto dkk., 2010, h. 12).

1) Slamet dalam Bresman menjelaskan, guna menghasilkan mutu, terdapat empat usaha yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan, yaitu: Menciptakan situasi “menang-menang” (*win-win*

- solution*) dan bukan situasi “kalah-menang” di antara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (*stakeholders*);
- 2) Perlu ditumbuh kembangkan motivasi instrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu;
 - 3) Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang;
 - 4) Menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, haruslah dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu (Rajagukguk, 2009, h. 79).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan PAUD adalah menggunakan sarana bermain dalam bentuk edukatif. Sarana bermain dalam bentuk Alat Permainan Edukatif (APE), sebagai sarana yang berfungsi membantu pamong dalam menciptakan situasi pembelajaran serta merangsang dalam pembentukan perilaku tertentu. Hampir semua taman penitipan anak maupun kelompok bermain telah memiliki alat permainan edukatif walupun dilihat dari jumlah dan jenisnya masing-masing lembaga sangat bervariasi, hal ini tergantung dari kemampuan lembaga tersebut, ada yang sangat lengkap, tetapi ada juga yang masih sangat terbatas. Termasuk juga ketersediaan sarana/prasarana pendukung lainnya seperti ruang belajar, ruang bermain dan perlengkapan lainnya juga sangat bervariasi (Hiryanto dkk., 2010, h. 9).

Pencapaian mutu pendidikan anak usia dini dapat diukur dengan membandingkan hasil pencapaian program dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Komponen *input*, proses dan *output*, lembaga pendidikan anak usia dini dikatakan bermutu apabila aktivitas pelayanan yang dilakukan betul-betul mengarah pada pencapaian hasil yang diharapkan dengan mendayagunakan input-input yang ada secara terpadu, harmonis dan optimal. Standar ini diantaranya meliputi kurikulum, proses pembelajaran, peserta didik, ketenagaan, sarana dan prasarana, peran serta masyarakat, organisasi kelembagaan, administrasi dan manajemen serta lingkungan pendukung dan pembiayaan, dengan kata lain layanan PAUD bermutu manakala dapat memenuhi Standar Minimal Manajemen (SMM), Standar Minimal Tenaga Kependidikan (SMTK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Hiryanto dkk., 2010, h. 10-11).

2.3.2 Peran Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu RA

Peran kepala dapat berlangsung di dalam dan di luar organisasi. Karena itu salah satu peran strategis seseorang dalam organisasi lain sebagai manajer adalah kepemimpinan. Menurut Robbins dalam Syafaruddin dan Asrul (2014, h. 59), peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan berkaitan dengan tugas seseorang dalam kedudukan pada unit sosial. Sedangkan menurut Newel, peran adalah sama dengan perilaku dalam kedudukan tertentu dan mencakup perilaku itu sendiri dan sikap serta nilai yang melekat dalam perilaku.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan Nasional Depdiknas, terdapat tujuh peran utama kepala sekolah. Tujuh peran utama kepala sekolah tersebut, yaitu sebagai *supervisor*, *edukator*, *manager*, *administrator*, *supervisor*, *leader*, *motivator*, pencipta iklim kerja, wirausahawan, serta layanan bimbingan dan konseling (Helmawati, 2014, h. 17-18).

Dari sisi tenaga pendidik, kepala sekolah dituntut untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi guru. Kepala sekolah juga sebagai *adminstrator* dalam keuangan, sebagai *supervisor* dalam segala aspek pendidikan (8 standar pendidikan nasional) dan sebagai *leader* dalam lembaga pendidikan baik dari segi tugas maupun SDM. dan bukan hanya itu, kepala sekolah juga sebagai pencipta iklim kerja yang kondusif yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, Kepala sekolah juga berperan sebagai wirausahawan, serta berperan dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu personal sekolah (tenaga pendidik dan kependidikan beserta peserta didik) dalam menghadapi permasalahan dan berperan serta mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan cara membuat aturan atau kebijakan oleh kepala sekolah (Helmawati, 2014, h. 29).

Jadi dapat penulis simpulkan untuk meningkatkan mutu pendidikan oleh kepala sekolah harus memberikan pelayanan dan bimbingan untuk membantu personel dalam menghadapi masalah

sehingga kepala sekolah berperan untuk membuat aturan atau kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu lulusan dan merupakan peran dan tugas kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memiliki peran *leader, educator, motivator, inovator, dan administrator*.

2.3.3 Model Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sekolah

Model kebijakan merupakan suatu bentuk kebijakan yang dapat di ambil atas beberapa pertimbangan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan baik dari pertimbangan tujuan, strategi maupun keperluan lingkungan. Adapaun model model kebijakan kebijakan yaitu:

2.3.3.1 Model Deskriptif

Model pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan oleh penelitian dalam ilmu pengetahuan (baik ilmu pengetahuan murni maupun terapan) untuk menerangkan sesuatu gejala yang terjadi di dalam masyarakat (Suryadi & Tilaar, 1994, h. 46). Sedangkan menurut Cohn dalam Sagala (2009), model deskriptif adalah pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan menyajikan sesuatu "*State of the art*" atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang diteliti dan perlu diketahui para pemakai (h. 104).

2.3.3.2 Model Normatif

Di antara beberapa jenis model normatif yang di gunakan analisis kebijakan dalam model normatif yang membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum tugas kepala sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan dapat memecahkan suatu masalah kebijakan. Pendekatan normatif ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan dapat menyelesaikan masalah masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat pada semua jenjang dan jenis pendidikan (Rusdiana, 2015, h. 47-48).

2.3.3.3 Model Verbal

Model verbal adalah kebijakan yang diekspresikan dalam bahasa sehari hari disini kepala sekolah membuat kebijakan adalah dengan menggunakan bahasa sehari hari yaitu dengan menggunakan ekspresi atau gaya kepemimpinan yang telah di buat tersebut.

2.3.3.4 Model Sebagai Pengganti dan Perspektif

Pendekatan model perspektif merupakan upaya ilmu pengetahuan menawarkan suatu norma, kaidah atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai memecahkan suatu masalah khususnya masalah kebijakan. Model bentuk perspektif juga biasanya berbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis

data. Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif. Model pengganti mulai disadari atau tidak dari asumsi bahwa masalah formal adalah representasi yang sah dari masalah yang substantif. Sedangkan model perspektif didasarkan pada asumsi bahwa masalah formal tidak pernah sepenuhnya mewakili secara sah masalah substantif. Hal ini penting karena pemecahan masalah pendidikan ini harus dilakukan dengan tepat, jika tidak tentu akan mendapatkan kerugian baik waktu, material, dan juga penyimpangan dari tujuan yang telah ditentukan (Rusdiana, 2015, h. 48).

Jadi, berdasarkan beberapa uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa kepala sekolah merupakan orang pemimpin yang berfungsi sebagai inovator dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan menggunakan model model yang tepat disini kepala sekolah membuat kebijakan dengan melihat hal yang terjadi sehingga dengan mudah menggunakan meodel apa untul membuat suatu keputusan.

2.3.4 Langkah-Langkah Kebijakan Kepala Sekolah

Dalam suatu kebijakan pendidikan terdapat tiga tahap kebijakan yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi. kepala sekolah sebagai petugas yang profesional di tuntutan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi dari kebijakan pendidikan tersebut adapu tiga tahap kebijakan sebagai berikut (Rusdiana, 2015, h. 49):

2.3.4.1 Formulasi Kebijakan

Formulasi adalah perumusan atau pembuatan. Jadi, formulasi kebijakan adalah pembuatan /perumusan suatu kebijakan dalam pendidikan. Berikut adalah tahap tahap dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan:

- 1) Penyusunan agenda, yakni disini menempatkan masalah pada agenda pendidikan.
- 2) Formulasi kebijakan, yakni merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.
- 3) Adopsi kebijakan, yakni kebijakan alternatif tersebut di adopsi /diambil untuk solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut.
- 4) Implementasi kebijakan, yakni kebijakan yang telah diambil di laksanakan dalam pendidikan.
- 5) Penilaian kebijakan, yakni tahap ini tahap penelitian dalam pembuatan kebijakan dalam pencapaian tujuan dalam kebijakan pendidikan.

Jadi, dalam merumuskan suatu kebijakan kepala sekolah, penyusunan agenda, yakni di sini menempatkan masalah pada agenda, merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah pendidikan. Adopsi kebijakan, yakni kebijakan alternatif tersebut diadopsi/diambil untuk solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut kebijakan yang telah diambil

dilaksanakan dalam pendidikan dan yang terakhir penilaian kebijakan, yakni tahap ini merupakan tahap dalam pembuatan kebijakan dalam pencapaian tujuan dalam kebijakan pendidikan.

2.3.4.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Syarifuddin (2008, h. 86) mengutip pendapat Putt & Springer, implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam pembuatan kebijakan terwujud ke dalam praktek atau realisasinya.

Menurut Edward, Metter, dan Horn yang telah dikutip oleh Indah (2016, h. 41), terdapat lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumberdaya, kecenderungan/disposisi implementor, struktur birokrasi dan lingkungan eksternal yaitu lingkungan sosial ekonomi. Untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan langkah yaitu: Pertama, secara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program pendidikan. Kedua, dapat melalui kebijakan derivat (turunan) dari kebijakan pendidikan nasional tersebut (Indah, 2016, h. 86).

Berdasarkan dari paparan di atas terlihat bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah di buat oleh kepala

sekolah atau madrasah dalam bentuk suatu praktek maka akan lebih mudah bila di mulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan dengan menggunakan langkah langkah kebijakan seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam mengimplentasikan suatu kebijakan di sekolah dengan melihat faktor-faktor yang sangat penting, seperti komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana kebijakan yang segera atau di sebut sebagai “*policy performance*”. Secara kongkrit antara lain dapat kita lihat misalnya kualitas *output*, komunikasi yang baik dan sumber daya yang berkualitas yang dihasilkan oleh kepala madrasah dalam jangkah waktu tertentu untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat. Perubahan dalam meningkatnya mutu pendidikan dan taraf kesejahteraan masyarakat padat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai “*policy outcome*” atau “*policy impact*” (Indah, 2016, h. 87).

Agar implementasi kebijakan dalam pendidikan berjalan dengan lancar dan sukses maka perlu dianalisis tentang peraturan yang dapat mendukung kebijakan, keuangan, personil dan prasarana lainnya yang dapat mendukung suatu pelaksanaan kebijakan begitu juga agar pendidikan disuatu sekolah bermutu dan berkualitas maka dengan membuat suatu peraturan yang

dapat mendukung kebijakan, yaitu oleh kepala sekolah dan seluruh komponen yang ada di sekolah tersebut.

2.3.4.3 Evaluasi Kebijakan

Setelah adanya pelaksanaan kebijakan kemudian diadakan pengevaluasian dalam kebijakan pendidikan tersebut. Karena dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan tersebut telah dicapai. Evaluasi kebijakan tidak hanya berfokus pada evaluasi pelaksanaan kebijakan saja, akan tetapi evaluasi kebijakan mencakup evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Disini kepala sekolah melakukan suatu pemantauan kinerja, melaksanakan pengaruh evaluasi dan melaksanakan evaluasi proses guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan tersebut telah dicapai.

2.3.5 Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sekolah

Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan meningkatkan mutu tenaga akademik secara berkelanjutan, penataan program studi, peningkatan proporsi murid bidang sains dan keteknikan, pengembangan kurikulum yang fleksibel dan terkendali, peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengadaan sarana prasarana dan fasilitas penunjang, peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah,

dunia usaha, kalangan industri dan lembaga dalam dan luar negeri (Rivai dan Murni, 2010, h. 714).

Dalam lembaga pendidikan, kepala sekolah sebagai seseorang yang telah diberi wewenang untuk memimpin suatu lembaga pendidikan dan harus bertanggung jawab secara penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah yang berada di bawah pemimpinnya. Maju mundurnya suatu lembaga pendidikan itu banyak dipengaruhi oleh kepala madrasah, termasuk juga masalah peningkatan mutu pendidikan. Adapun dalam peningkatan mutu pendidikan, kepala sekolah dapat melaksanakannya dengan melalui beberapa komponen. Untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan adanya komponen-komponen lainnya agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut yaitu dengan adanya:

2.3.5.1 Guru

Kehadiran guru tidak akan tergantikan oleh unsur yang lain, lebih-lebih dalam masyarakat kita yang multikultural dan multidimensional, dimana peranan teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru sangat minim. Begitu pentingnya peranan guru dalam keberhasilan peserta didik maka hendaknya guru mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang ada dan meningkatkan kompetensinya sebab guru pada saat ini bukan saja sebagai pengajar tetapi juga

sebagai pengelolaan proses belajar mengajar (Nasution, 2017, h. 223-224).

Usaha peningkatan kualitas guru ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, di antaranya adalah:

1) Meningkatkan kedisiplinan guru

Untuk meningkatkan mutu pendidikan faktor kedisiplinan guru sangat diperlukan, karena program sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika guru-guru disiplin. Demikian sebaliknya jika guru-gurunya malas, maka program sekolah akan terbengkalai.

2) Meningkatkan pengetahuan guru

Untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju seperti sekarang ini, seorang guru dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuannya baik melalui kursus, membaca buku bacaan, majalah, surat kabar, dan sebagainya, atau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Syafaruddin & Asrul, 2014, h. 67).

3) *Inservice* dan *Upgrading*

Pembinaan dan usaha perbaikan pendidikan tidak mungkin berhasil tanpa disertai dengan pembinaan dan perbaikan mutu pengetahuan serta cara kerja para pelaksana yaitu guru-guru. Di antara usaha pembinaan dan perbaikan mutu pengetahuan guru tersebut dilakukan dengan *inservice*

training dan *upgrading*. Seperti apa yang diungkapkan oleh Purwanto sebagai berikut: *Inservice training* ialah “segala kegiatan yang diberikan dan diterima oleh para petugas pendidikan (kepala sekolah, guru, dan sebagainya) yang bertujuan untuk menambah dan mempertinggi mutu pengetahuan, kecakapan dan pengalaman guru-guru dalam menjalankan tugas dan kewajibanya”. Program *Inservice training* dapat mencakup berbagai kegiatan seperti mengadakan aplikasi kursus, ceramah-ceramah, workshop, seminar-seminar, kunjungan ke sekolah-sekolah di luar daerah dan persiapan-persiapan khusus untuk tugas-tugas baru (Syafaruddin & Asrul, 2014, h. 69).

Inservice training ini sangat penting bagi guru, karena jika guru itu hanya mengandalkan dari pendidikan formal yang diperoleh di sekolah keguruan dalam mempersiapkan tenaga pendidikan, maka belum merupakan persiapan yang cukup lengkap dan memadai, juga adanya kurikulum sekolah yang mengalami perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat dan kebudayaan. Di samping itu, adanya suatu kenyataan, bahwa karena adanya suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Dengan demikian untuk meningkatkan kualitas guru sebagai tenaga pengajar dan tenaga pendidik *inservice* sangat

diperlukan. Sedangkan *upgrading* (penataran) sebenarnya tidak berbeda jauh dengan *inservice training*. *Upgrading* merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ilmu pengetahuan dan kecakapan para pegawai, guru atau petugas pendidikan lainnya, sehingga dengan demikian keahlian bertambah dan mendalam (Syafaruddin & Asrul, 2014, h. 70).

4) Rapat Guru

Rapat guru adalah suatu cara dalam rangka meningkatkan kualitas guru di dalam mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik. Salah satu bentuk rapat guru yang dilaksanakan oleh kepala sekolah ialah konferensi atau musyawarah yang bertujuan untuk membimbing guru-guru agar lebih efektif dalam perbaikan pengajaran di sekolah (Syafaruddin & Asrul, 2014, h. 54).

2.3.5.2 Siswa

Siswa merupakan hal yang terpenting dalam suatu pendidikan tanpa siswa suatu sekolah tidak akan maju. dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa juga harus mendapatkan perhatian, peningkatan mutu atau kualitas siswa ini dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1) Mengaktifkan Siswa

Mengaktifkan siswa ini dilakukan dengan cara misalnya dengan mengabsen siswa setiap kali akan

memulai dan akhir pelajaran berlangsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti siswa meninggalkan sekolah (bolos) sebelum jam pelajaran selesai dan lain-lain.

2) Memberikan Bimbingan

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan di dalam belajar, siswa membutuhkan bimbingan. Banyak siswa yang tidak mendapatkan nilai yang baik dalam pelajarannya (di sekolah) karena tidak mengetahui cara-cara belajar yang efektif dan efisien. Maka dalam mengusahakan agar siswa mempunyai ketarampilan belajar yang baik perlu kiranya seorang guru memberi bimbingan yang berupa petunjuk tentang cara belajar yang baik. Kemudian untuk memberi kebiasaan belajar yang baik bimbingan itu hendaknya diberikan sewaktu-waktu anak mempelajari pelajaran yang disajikan. “Hasilnya lebih baik bila bimbingan itu diberikan sewaktu anak mempelajari pelajaran yang disajikan” menurut uraian di atas bimbingan guru yang berupa tentang cara belajar yang baik perlu diberikan kepada siswa dengan demikian maka prestasi siswa dapat meningkat (Syafaruddin & Asrul, 2014, h. 7).

3) Pemberian Tugas pada Siswa Mengadakan Kegiatan Ekstra Kurikuler

Untuk meningkatkan kualitas siswa pemberian tugas perlu diberikan. Karena hal ini akan dapat merangsang belajar siswa. Dalam menunjang keberhasilan siswa dalam belajar, maka kegiatan kurikuler perlu diadakan, baik bidang olah raga, pramuka, kesenian, keagamaan maupun kegiatan lain yang berguna bagi siswa.

2.3.5.3 Sarana Prasarana

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dibutuhkan sarana yang memadai dengan sarana yang cukup maka akan memudahkan pencapaian tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat di pengaruhi oleh kondisi saran dan prasarana pendidikan yang di miliki sekolah oleh optimalisasi dan pemanfaatannya (Matin dan Fuad, 2016, h. 1).

2.3.5.4 Kerjasama dengan Wali Murid

Penyelenggaraan pendidikan akan lebih berhasil jika adanya kerja sama antara sekolah dengan orang tua murid, di mana sekolah akan memberi informasi tentang keadaan

anaknya dirumah sehingga hubungan mereka itu adalah saling menunjang di dalam keberhasilan belajar siswa (Purwanto, 1984, h. 68).

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adanya program-program pendidikan di sekolah guru dengan meningkatkan kedisiplinan guru, meningkatkan pengetahuan, dan pembinaan pelatihan kinerja guru di samping itu juga upaya meningkatkan mutu adanya siswa dengan memberikan bimbingan, serta tersedianya sarana prasarana guna mendukung proses pembelajaran dan dan adanya kerja sama dengan wali murid.

2.4 Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian ini. Namun, ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rasmi (2015, h. 54) dengan judul “Peningkatan Mutu dan Profil Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Total Quality Management (TQM)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam manajemen mutu terpadu dalam pendidikan harus menempatkan pelanggan dan produk sebagai perhatian utama. Oleh karena itu, perlunya pengembangan kurikulum secara terus menerus berdasarkan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Dimana pelanggan utama pendidikan adalah peserta didik yang menerima pelayanan pendidikan dan latihan,

sedangkan produknya adalah peluang pembelajaran yang harus tercapai keperluan yang elemennya adalah kurikulum dan sumber daya pembelajaran.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli (2015, h. 171) dengan judul “Eksistensi Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah di Provinsi Sulawesi Tenggara”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan rencana jumlah dan alokasi akreditasi sekolah/madrasah, pengumuman pendaftaran akreditasi, pengusulan untuk akreditasi, penyampaian perangkat akreditasi, pengisian instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung, pengiriman isian instrumen akreditasi, evaluasi isian instrumen dan audit dokumen, penetapan kelayakan, visitasi ke sekolah/madrasah, validasi proses dan hasil visitasi, verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi, penerbitan sertifikat akreditasi, pelaporan data dan sosialisasi hasil akreditasi sekolah/madrasah, dan telah berhasil mengakreditasi S/M sepanjang tahun 2006-2014 sebanyak 5.660 sekolah/madrasah, yakni 5.109 sekolah atau 90,3% dan 551 madrasah atau 9,7%, dan potret penjaminan mutu pendidikan, BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai lembaga yang mengakreditasi Sekolah/Madrasah sebagai salah satu komponen peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah adalah terbentuknya pengurus BAP S/M Provinsi Sulawesi

Tenggara, Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kab/Kota, terjalinnya koordinasi yang baik dengan Diknas dan Depag, asesor yang cukup dalam berbagai jenjang pendidikan, tersedianya anggaran yang memadai dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan faktor penghambat adalah kesadaran pemimpin madrasah masih rendah dan masih ada di antaranya yang belum mengetahui adanya akreditasi madrasah, serta lemahnya manajemen madrasah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ardin dan Badarwan (2018, h. 117) dengan Judul “Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Swasta dalam Peningkatan Keunggulan Bersaing”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketiga SMK S mengimplementasikan manajemen pengembangan mutu sehingga mereka mampu bersaing dengan SMK Negeri. Selain itu juga, ada muatan agama yang diberikan dan kerjasama tim yang solid dan bertanggungjawab.

Faktor-faktor keberhasilan dari ketiga SMK ini adalah manajemen yang tertata dalam setiap hal, SDM handal, hubungan yang baik dengan lingkungan kerja, dan kebijakan-kebijakan yang matang. Kontribusi manajemen pengembangan mutu terhadap prestasi yang dicapai SMK S dalam peningkatan keunggulan bersaing adalah menjalankan tanggung jawab dan wewenang dengan baik, tanggung jawab manajemen, penetapan standar kerja, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Dengan demikian, pengimplementasian manajemen pengembangan mutu di SMK Swasta telah dapat menjadikan sekolah bermutu yang dapat meningkatkan keunggulan bersaing di Provinsi Jambi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2015, h. ii) dengan judul “Peningkatan Mutu Pendidikan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fatimah Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan PAUD Fatimah Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo meliputi: 1) Peningkatan keaktifan guru, kepala sekolah dan administrasi manajemen dalam mengikuti pelatihan maupun seminar, 2) Peningkatan sumber daya manusia dengan pembiasaan dan kemampuan dasar sehingga siswa mampu mengendalikan diri dan berkarakter kuat, 3) Faktor pendukung peningkatan mutu pendidikan pada PAUD Fatimah yaitu adanya tujuan sekolah, adanya guru; kepala sekolah; dan tenaga administrasi yang profesional di bidangnya, adanya siswa aktif; cerdas dan kreatif, adanya penyempurnaan dan peningkatan sumber daya yang telah ada (dana, kurikulum, sarana dan prasarana), dan adanya suasana lingkungan yang kondusif seperti lingkungan yang bersih, serta adanya hubungan yang erat dan rasa kekerabatan antara guru, orang tua, warga sekolah ataupun satuan kerja sekolah lainnya.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini yaitu peningkatan mutu. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu dalam hal pembangunan satuan pendidikan dan pembiayaan peserta didik, waktu dan tempat penelitian. Maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu RA (Studi Kasus pada RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari).